



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 259/050/2026
TENTANG
DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur bahwa daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariman tentang Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman terdiri dari:
a. indikator kinerja makro;

- b. indikator kinerja sasaran visi;
- c. indikator kinerja utama;
- d. indikator kinerja daerah; dan
- e. indikator program unggulan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

KETIGA : Kriteria Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman sebagai berikut:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. memenuhi kebutuhan mendesak.

KEEMPAT : Daftar Data Prioritas Tingkat Kota Pariaman dijadikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi vertikal di daerah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PABAT / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	
KEPENGANTARAN DAN KEMENTERIAN KAWAYAT	
KABUPATEN HUKUM	
PERANGKAT PERATURAN	
PERANGKAT PERATURAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR /050/2026
TENTANG
DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA
PARIAMAN

DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT KOTA PARIAMAN

No	INDIKATOR
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2	Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Dasar Harga Berlaku
3	Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Dasar Harga Konstan
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan
5	Gini Rasio
6	Angka Kemiskinan
7	Tingkat pengangguran terbuka
8	Indeks Pembangunan Manusia
9	Angka Harapan Hidup
10	Angka Harapan Lama Sekolah
11	Angka Rata-rata Lama Sekolah
12	Jumlah Penduduk Miskin
13	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perikanan
14	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Industri Pengolahan
15	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
17	Indeks Kota Layak Huni/ <i>Liveable City</i>
18	Indeks Reformasi Birokrasi
19	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah
20	Prevalensi <i>stunting</i>
21	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
22	Persentase kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
23	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
24	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
25	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
26	Indeks Desa
27	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
28	Indeks Infrastruktur
29	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses terhadap hunian yang layak terjangkau dan berkelanjutan
30	Indeks Risiko Bencana
31	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

No	INDIKATOR
32	Rasio Konektivitas
33	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
34	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
35	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
36	Indeks Pemerintahan Digital
37	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara
38	Dokumen Merit Sistem
39	Indeks Pelayanan Publik
40	Tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik
41	Indeks Kepuasan Masyarakat
42	Jumlah Budaya Lokal yang Masuk Kalender <i>Event</i> Pariwisata Nasional
43	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan
44	Jumlah Kawasan Destinasi Unggulan Wisata Kota Pariaman
45	Indeks Ketahanan Pangan
46	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
47	Konsumsi Listrik Per Kapita
48	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan
49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
50	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
51	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
52	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
53	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
54	Indeks Ketahanan Daerah
55	Laju Pertumbuhan Penduduk
56	Rasio Penduduk/ <i>Sex Ratio</i>
57	Kepadatan Penduduk
58	Kapasitas air baku
59	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
60	Indeks Keluarga Sehat
61	Angka Literasi/Numerasi
62	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
63	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
64	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
65	Indeks Kerukunan Umat Beragama
66	Indeks Pembangunan Kebudayaan
67	Indeks Perlindungan Khusus Anak
68	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
69	Indeks Ketimpangan Gender
70	Indeks Pembangunan Gender
71	Indeks Pembangunan Pemuda
72	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

No	INDIKATOR
73	Persentase Pemberdayaan sosial masyarakat miskin dan kelompok rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan sosial
74	Persentase Jaminan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan kelompok rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
75	Persentase Ketersediaan Pangan/tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan
76	Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita
77	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal
78	Persentase pekerja informal
79	Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi
80	Angka Ketergantungan
81	Rasio Produk Domestik Regional Bruto Industri Pengolahan
82	Rasio Produk Domestik Regional Bruto Akomodasi Makan dan Minum
83	Proporsi Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kreatif
84	Rasio Kewirausahaan Daerah
85	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
86	Indeks Inovasi Daerah
87	Indeks Ekonomi Hijau
88	Indeks Ekonomi Biru Indonesia
89	Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer
90	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
91	Pembentukan Modal Tetap Bruto
92	Ekspor Barang dan Jasa
93	Indeks Infrastruktur
94	Persentase Desa Mandiri
95	Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
96	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto
97	Tingkat Inflasi
98	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
99	Total Dana Pihak Ketiga/ Produk Domestik Regional Bruto
100	Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/kota
101	Total kredit/ Produk Domestik Regional Bruto
102	Rasio Produk Domestik Regional Bruto sektor jasa keuangan
103	Persentase kerja sama daerah ditindaklanjuti
104	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
105	Indeks Reformasi Hukum
106	Survey Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
107	Persentase Penegakkan Perda
108	Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia
109	Indeks Kewaspadaan Nasional
110	Indeks Daya Saing Daerah
111	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini

No	INDIKATOR
112	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
113	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
114	Persentase Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Sesuai Kualifikasi Strata 1/Diploma 4
115	Persentase Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah yang memiliki Sertifikat Pendidik
116	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Terakreditasi minimal B
117	Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar
118	Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Menengah Pertama
119	Kemampuan Numerasi Siswa Sekolah Dasar
120	Kemampuan Numerasi Siswa Sekolah Menengah Pertama
121	Karakter Siswa Sekolah Dasar
122	Karakter Siswa Sekolah Menengah Pertama
123	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
124	Persentase Anak Usia 5 sampai dengan 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini
125	Persentase Anak Usia 7 sampai dengan 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar/Sekolah Dasar/Angka Partisipasi Sekolah
126	Persentase Anak Usia 13 sampai dengan 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama/Angka Partisipasi Sekolah
127	Persentase Anak Usia 7 sampai dengan 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan
128	Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui
129	Jumlah kematian ibu
130	Jumlah Kematian Balita
131	Insidensi Tuberkulosis
132	Insidensi <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
133	Persentase Hipertensi dalam pengendalian
134	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian
135	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
136	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
137	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
138	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan
139	Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi Sumber Daya Masyarakat Kesehatan
140	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah
141	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
142	Rasio Keterhubungan Jalan
143	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang

No	INDIKATOR
144	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
145	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir
146	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas
147	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik
148	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik
149	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik
150	Persentase penataan bangunan dan lingkungan
151	Tingkat kemantapan jalan
152	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli
153	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
154	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Hektare di Kabupaten/ Kota yang ditangani
155	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni
156	Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Provinsi/ Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
157	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditangani
158	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
159	Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
160	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan
161	Persentase Kegiatan Penyelamatan di Lingkup Pemerintah Kota Pariaman yang terfasilitasi
162	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
163	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
164	Persentase penanganan pascabencana
165	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan
166	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
167	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
168	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
169	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
170	Indeks Kesejahteraan Sosial
171	Persentase layanan Rehabilitasi sosial Masyarakat miskin dan kelompok Rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
172	Persentase pelayanan bagi korban bencana alam dan atau sosial
173	Jumlah Taruna Siaga Bencana aktif dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan penanganan bencana

No	INDIKATOR
174	Jumlah monitoring masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial
175	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial individu dan kelembagaan yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas
176	Jumlah pemutakhiran data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
177	Jumlah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
178	Jumlah laporan perawatan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan
179	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani
180	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
181	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
182	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
183	Persentase Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
184	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
185	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
186	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
187	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
188	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya
189	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya di luar <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang Terpenuhi Kebutuhannya
190	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
191	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
192	Indeks Peranan Sosial
193	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
194	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
195	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin

No	INDIKATOR
196	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
197	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi
198	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan
199	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik
200	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
201	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya
202	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
203	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
204	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
205	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Kota
206	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
207	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
208	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan
209	Strata Kota Layak Anak
210	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif
211	Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
212	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
213	Persentase layanan bagi keluarga dan perlindungan anak
214	Persentase Forum kelembagaan anak yang aktif
215	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak
216	Skor Pola Pangan Harapan
217	Persentase Ketersediaan Pangan
218	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan
219	Angka Kecukupan Energi
220	Angka Kecukupan Protein Masyarakat
221	Persentase Keamanan Pangan
222	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
223	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
224	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi
225	Indeks Kualitas Air
226	Indeks Kualitas Udara
227	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang

No	INDIKATOR
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota
228	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan yang Ditindaklanjuti
229	Persentase Ruang Terbuka Hijau
230	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terkelola
231	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
232	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
233	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
234	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
235	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
236	Persentase penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital
237	Persentase penduduk yang telah perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
238	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
239	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan di Perangkat Daerah
240	Persentase Desa dengan status Mandiri
241	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
242	Persentase penataan wilayah Desa dan kewenangan Desa
243	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
244	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum Adat
245	Indeks Pembangunan Keluarga
246	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> per wanita usia subur usia 15 sampai dengan 49 tahun
247	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi/ <i>unmet need</i>
248	Persentase Kelompok Tribina yang aktif
249	Persentase Cakupan Layanan Berlalu Lintas
250	Konektivitas Darat
251	Konektivitas Laut
252	Indeks tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
253	Indeks keterbukaan informasi publik
254	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
255	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah
256	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
257	Persentase peningkatan kualitas Usaha Mikro Kecil
258	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

No	INDIKATOR
259	Pertumbuhan Wirausaha
260	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
261	Persentase Koperasi Aktif
262	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
263	Persentase Pertumbuhan wirausaha
264	Proporsi Usaha Kecil Menengah yang menjalin kemitraan dan ekspor
265	Persentase koperasi yang berbadan hukum
266	Persentase peningkatan investasi di Kota
267	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi
268	Realisasi Total terhadap target Investasi
269	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
270	Indeks Kepuasan Layanan Perizinan
271	Dokumen Data dan informasi tersedia Secara elektronik
272	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan
273	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi pada Kompetisi Olahraga minimal Tingkat Provinsi
274	Persentase Pemuda yang Aktif Berwirausaha
275	Jumlah Atlet Berprestasi minimal Tingkat Provinsi
276	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
277	Indeks Pembangunan Statistik
278	Indeks keamanan informasi
279	Persentase Tingkat Keamanan Siber Sandi
280	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan
281	Persentase Pengembangan Kebudayaan
282	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
283	Persentase Pembinaan Sejarah
284	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
285	Persentase Pengelolaan Museum
286	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
287	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
288	Indeks Pengawasan Arsip
289	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah
290	Jumlah dokumen/arsip yang diakuisisi
291	Angka Konsumsi Ikan
292	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
293	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
294	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
295	Jumlah peningkatan daya tarik destinasi wisata
296	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Disertifikasi

No	INDIKATOR
297	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah
298	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
299	Persentase pengembangan ekonomi kreatif
300	Persentase pemasaran pariwisata
301	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
302	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Dpmestik Regional Bruto
303	Produksi Sektor Pertanian
304	Produksi Sektor Perikanan
305	Produksi Sektor Peternakan
306	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Kota
307	Jumlah Produksi Padi
308	Jumlah Produksi Daging Sapi
309	Persentase Penurunan Luasan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
310	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian
311	Persentase Penurunan Kasus Zoonosis
312	Luas Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
313	Jumlah Kelompok Petani yang Naik Kelas Kemampuan
314	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
315	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
316	Persentase penanganan pengaduan konsumen
317	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan
318	Persentase pertumbuhan sektor industri
319	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
320	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
321	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
322	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal
323	Indeks Tata Kelola Pengadaan
324	Indeks Kualias Kebijakan
325	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Fisik Perangkat Daerah
326	Indeks Kematangan Perangkat Daerah
327	Indeks Kesalehan Sosial
328	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
329	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan
330	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
331	Persentase Ketepatan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun
332	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
333	Indeks perencanaan pembangunan
334	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen

No	INDIKATOR
	Perencanaan
335	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pengukuran Kinerja
336	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercapai
337	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
338	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
339	Persentase keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
340	Persentase keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan
341	Persentase keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
342	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
343	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Evaluasi
344	Persentase tindak lanjut temuan
345	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah di perangkat daerah
346	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
347	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB
348	Persentase Organisasi Perangkat Daerah bernilai baseline Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah minimal 3
349	Persentase Peningkatan Kontribusi Tiap tahun
350	Persentase ketercapaian penunjang Urusan Pemerintah Daerah
351	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah
352	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
353	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
354	Persentase peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
355	Indeks penerapan sistem merit pada Reformasi Birokrasi
356	Tingkat Kepuasan Peserta Pesantren Aparatur Sipil Negara
357	Persentase dimensi kualifikasi bernilai Tinggi
358	Persentase dimensi kompetensi bernilai Tinggi
359	Persentase dimensi kinerja bernilai Tinggi
360	Persentase dimensi disiplin bernilai Tinggi
361	Nilai capaian aspek Perencanaan Kebutuhan
362	Nilai capaian aspek Pengadaan Pegawai
363	Nilai capaian aspek Pengembangan Karir
364	Nilai capaian aspek Promosi dan Mutasi
365	Nilai capaian aspek Manajemen Kinerja

No	INDIKATOR
366	Nilai capaian aspek Penggajian dan Penghargaan
367	Nilai capaian aspek Perlindungan dan Pelayanan
368	Nilai capaian aspek Sistem Informasi
369	Persentase Tingkat Kehadiran Peserta Pesantren Aparatur Sipil Negara
370	Persentase peserta Pesantren Aparatur Sipil Negara yang memiliki pemahaman yang baik
371	Persentase <i>database</i> kepegawaian yang tersedia secara lengkap
372	Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti
373	Persentase penyelesaian produk layanan
374	Persentase penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
375	Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan
376	Persentase prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bernilai baik
377	Persentase Pemanfaatan Dokumen Penelitian Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Pengembangan
378	Persentase Pemanfaatan Dokumen Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
379	Persentase capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
380	Persentase Ketercapaian penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kota Pariaman
381	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
382	Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi
383	Presentase Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
384	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan
385	Indeks Ketentraman dan Ketertiban
386	Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non kekerasan
387	Indeks Demokrasi Kota Pariaman
388	Persentase tingkat pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
389	Persentase Tingkat Kondusifitas Demokrasi Partai Politik
390	Persentase tingkat pencegahan Penyalahgunaan narkoba dan Ketentraman Kerukunan Umat Beragama
391	Persentase tingkat kondusivitas Hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
392	Persentase Petugas Keagamaan dan unsur Lembaga Adat yang memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan usulan Desa dan Kelurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
393	Jumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu Kota Pariaman penerima manfaat Saga Saja Plus
394	Persentase Mahasiswa Saga Saja yang terfasilitasi pendidikan

No	INDIKATOR
	pelatihan keterampilan hidup/ <i>life skill</i>
395	Jumlah Siswa Tidak Mampu yang Mengikuti Bimbingan Belajar Sekolah Kedinasan
396	Jumlah Siswa Program Sekolah Kedinasan yang Lulus Sekolah Kedinasan
397	Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak yang Unggul
398	Jumlah Guru Sekolah Dasar yang Unggul
399	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama yang Unggul
400	Persentase masyarakat miskin Kota Pariaman yang memiliki jaminan kesehatan
401	<i>Universal Health Coverage</i>
402	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan
403	Jumlah Pusat Kreatifitas Pemuda yang difasilitasi
404	Jumlah Wirausaha yang diberi pelatihan bisnis dan ekonomi
405	Jumlah Pemuda yang diberikan pelatihan digital
406	Jumlah <i>Event</i> budaya untuk pemuda yang diselenggarakan
407	Jumlah Gelanggang Olah Raga yang dilengkapi fasilitasnya
408	Jumlah <i>event sport tourism</i>
409	Kunjungan wisatawan
410	Jumlah Kartu Keluarga Sasaran
411	Peningkatan omset Kartu Keluarga Sasaran
412	Poporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
413	Tumpukan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
414	Jumlah bank sampah yang terbentuk
415	Jumlah sampah di kawasan wisata yang terkelola
416	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang berfungsi
417	Persentase Penurunan Angka <i>Idle Capacity</i>
418	Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Aman
419	Jumlah Kegiatan Ekowisata & Destinasi Yang terkelola
420	Persentase Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan Sesuai dengan Standar
421	Jumlah usaha pengolahan ikan
422	Jumlah Aset yang direvitalisasi
423	Jumlah partisipasi etnis yang ada di Kota Pariaman dalam <i>Event</i> Seni dan Budaya di Kota Pariaman
424	Persentase Capaian Target Hafiz Per Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
425	Jumlah Masjid/Surau Percontohan
426	Persentase Masyarakat Kota Pariaman yang memiliki Jaminan Kesehatan
427	Jumlah ekowisata yang dikelola
428	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang melindungi Pekerja Rentan
429	Jumlah Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang berfungsi

No	INDIKATOR
430	Persentase Rumah Tangga penerima manfaat Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal
431	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pesantren Aparatur Sipil Negara
432	Diseminasi Program Unggulan/informasi
433	Jumlah sampah yang terkelola

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PANAFA KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PANAFA / TGL
SENDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMAHATANGAN BARYAT	16/7-26
KABAG HUKUM	16/7-26
PERANCANG PERATURAN PEMUNDING UNDANGAN	17/7-26